

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**TAHUN 2026 ATAS
KINERJA TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan dasar hukum tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang digunakan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik

(*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Januari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



MADIHAH.S.K.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19750312 199703 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Program dan Kegiatan	17
2.3. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Langkah – Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja	72
LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.	Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025;
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025;
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja P-APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2024
Tabel 3.1.1.A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi;
Tabel 3.1.1.B.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023;
Tabel 3.1.1.C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra;
Tabel 3.1.1.D.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
Tabel 3.1.1.E.	Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
Tabel 3.1.1.F.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
Tabel 3.1.1.G.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
Tabel 3.1.1.H.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
Tabel 3.1.1.I.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
Tabel 3.1.2.A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi;
Tabel 3.1.2.B.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023;
Tabel 3.1.2.C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra;

Tabel 3.1.2.D.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
Tabel 3.1.2.E.	Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
Tabel 3.1.2.F.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
Tabel 3.1.1.G.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
Tabel 3.1.2.H.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
Tabel 3.1.2.I.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
Tabel 3.1.3.A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi;
Tabel 3.1.3.B.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023;
Tabel 3.1.3.C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra;
Tabel 3.1.3.D.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
Tabel 3.1.3.E.	Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
Tabel 3.1.3.F.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
Tabel 3.1.3.G.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
Tabel 3.1.3.H.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
Tabel 3.1.3.I.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.
Tabel 3.2.	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran terhadap target yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama rata-rata sudah pada pencapaian diatas 90%. Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp 19.180.442.383,- yang dilaksanakan melalui 12 (Dua Belas) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 85 (Delapan Puluh Lima Delapan) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2025 **adalah**

Rp 16.094.782.872,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 83,91 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Sejarah Organisasi

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial. Namun Pada Tahun 2020, Dinas Sosial merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada tahun ini sudah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang mengampu tiga urusan sekaligus. Urusan tersebut antara lain Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 53 Tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 14 kali, yaitu:

1. Tahun 1971 - 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
2. Tahun 1986 - 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
3. Tahun 1994 - 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
4. Tahun 1998 - 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
5. Tahun 2005 - 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
6. Tahun 2010 - 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum S, SH, M.Mpd.
7. Tahun 2011 - 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
8. Tahun 2012 - 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
9. Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
10. Tahun 2013 – 2015 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukam, M.Si.
11. Tahun 2015 - 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
12. Tahun 2017 – 2020 dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, M.M.
13. Tahun 2020 – 2021 dipimpin oleh Ibu Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si.
14. Tahun 2020 – 30 September 2025 dipimpin oleh Bapak Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si.
15. 1 Oktober 2025 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Ibu Madihah, S.K.M.

Selama 53 tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan tingginya input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

A. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
2. Dinas sebagaimana dimaksud dengan nomor 1 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;

3. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada nomor 2 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

l. Susunan Organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- II. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - III. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - IV. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - V. Masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
 - VI. Uraian Tugas dan Fungsi, yaitu:
 1. Sekretariat
 - a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan, dan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
 - Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas
 - Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - Pelaksanaan administrasi umum Dinas;
 - Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
1. Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 2. Melaksanakan administrasi umum Dinas;
 3. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 4. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;
 5. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;

6. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pelindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial;
- Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- Pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

- Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
- Pelaksanaan layanan psikosial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri, meliputi penyediaan layanan psikosial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri, dan
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;

- Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan system data gender dan anak, mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan daerah;
- Pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;

- Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisi dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah;
- Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan lingkup daerah;

- Pelaksanaan pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan dunia usaha Kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

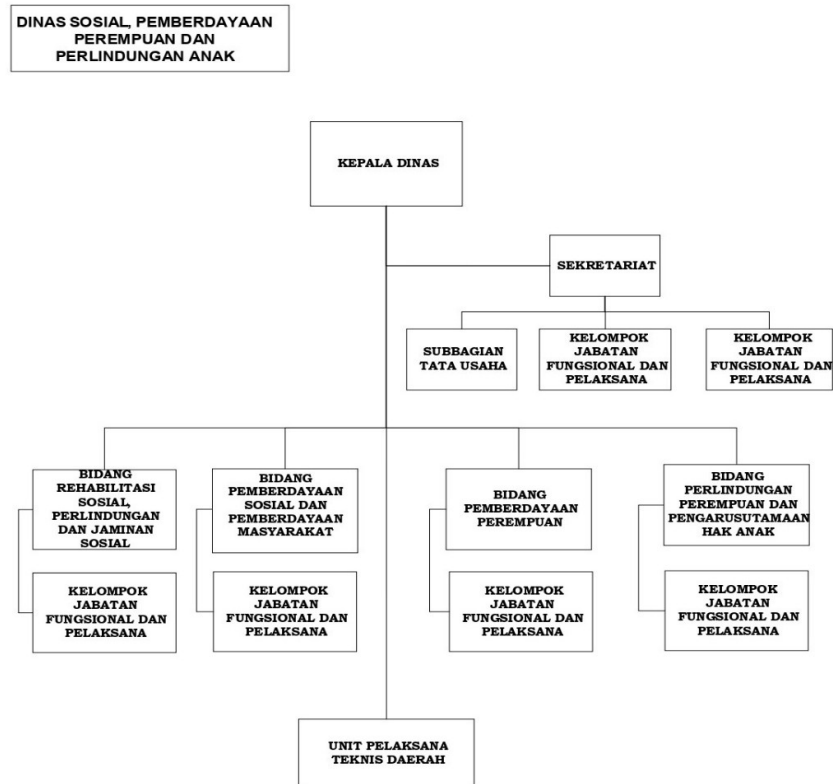
Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



1.1.3 Sumber Daya Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo per 31 Desember pada Tahun 2025 terdapat 50 (Lima Puluh) pegawai terdiri dari:

- 8 (Lima) orang pejabat struktural;
- 1 (satu) orang pejabat fungsional perencana ahli muda;
- 5 (lima) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli pertama;
- 1 (satu) orang pejabat fungsional analis kebijakan ahli muda;
- 4 (empat) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli muda;

- f. 1 (satu) orang pejabat fungsional arsiparis terampil;
- g. 1 (satu) orang pejabat fungsional pranata komputer mahir;
- h. 11 (sebelas) orang staf; dan
- i. 18 orang PPPK Paruh Waktu

1.1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.;
- c. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).;
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.;

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.; dan
- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

Pada September Tahun 2025 inflasi yang terjadi di Indonesia mencapai 2,65%. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

1. kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,60 persen;
2. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen;
3. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,85 persen;
4. kelompok kesehatan sebesar 2,98 persen;
5. kelompok transportasi sebesar 1,74 persen;
6. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,11 persen;
7. Kelompok pendidikan sebesar 2,54 persen;
8. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,98 persen;
dan
9. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 17,58 persen.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain:

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas;
- b. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah “ Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender” dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Persentase PMKS;
2. Indeks Pembangunan Gender.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Inklusif;
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak; dan
4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Yang Akuntabel.

2.2 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2025, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2025

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.928.378.333	6.231.171.716	89,94%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.790.000	113.268.435	97,82%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.910.000	7.289.000	81,81%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.880.000	105.979.435	99,16%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.138.034.318	4.599.150.064	89,51%
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.994.000.591	4.461.213.786	89,33%
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.928.000	110.178.000	99,32%
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.105.727	27.758.278	83,85%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.215.000	1.215.000	100,00 %
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.215.000	1.215.000	100,00 %

1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.905.317	268.153.555	99,72%
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.200.000	16.183.800	99,90%
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	252.705.317	251.969.755	99,71%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.056.295	314.425.378	94,98%
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.648.890	36.259.001	91,45%
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.661.200	16.204.431	97,26%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.189.062	10.962.876	97,98%
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	1.430.000	91,67%
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.934.272	99,56%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.767.143	180.379.774	98,16%
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	63.230.000	54.255.024	85,81%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.650.000	374.121.865	81,22%
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	55.000.000	55.000.000	100,00 %

1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	405.650.000	319.121.865	78,67%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.675.000	147.985.830	84,72%
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.972.500	99,08%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.690.000	103.160.870	79,54%
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.185.000	19.152.460	99,83%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.800.000	22.700.000	99,56%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.052.403	412.851.589	94,25%
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.484.193	21.152.588	90,07%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.926.470	71.055.228	93,58%
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	7.160.000	71,60%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.323.500	62.709.773	93,15%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.318.240	250.774.000	95,96%

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	41.122.920	36.858.100	89,63%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	41.122.920	36.858.100	89,63%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.732.500	1.848.300	39,06%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.697.500	29.600.000	96,42%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.359.820	1.219.800	89,70%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.184.000	3.130.000	98,30%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.149.100	1.060.000	92,25%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.277.045.897	1.141.774.536	89,41%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.066.405.000	947.481.251	88,85%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	746.000.000	696.645.000	93,38%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	1.450.000	1.450.000	100,00%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	37.250.000	30.470.001	81,80%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.250.000	15.311.000	60,64%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.905.000	37.105.000	92,98%

1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	72.325.000	71.600.000	99,00%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	51.050.000	48.080.750	94,18%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	74.625.000	40.000.000	53,60%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.050.000	1.350.000	13,43%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.500.000	450.000	30,00%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.500.000	750.000	50,00%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	5.500.000	4.269.500	77,63%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	210.640.897	194.293.285	92,24%
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	51.750.000	48.549.000	93,81%
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	98.940.897	94.299.185	95,31%
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	38.000.000	30.849.000	81,18%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.600.000	3.600.000	100,00%
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.000.000	3.999.000	99,98%
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.600.000	3.600.000	100,00%

1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.600.000	3.600.000	100,00%
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.250.000	5.102.400	97,19%
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	1.655.700	66,23%
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	3.000.000	2.639.000	87,97%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.916.910.987	5.884.274.916	74,33%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.916.910.987	5.884.274.916	74,33%
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	432.908.976	409.857.835	94,68%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.938.345.400	5.088.346.234	73,34%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	545.656.611	386.070.847	70,75%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	263.640.788	216.184.425	82,00%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	160.296.880	116.828.425	72,88%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	56.900.000	37.230.225	65,43%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	7.696.880	1.148.200	14,92%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8.200.000	-	0,00%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.400.000	700.000	29,17%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	85.100.000	77.750.000	91,36%

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	103.343.908	99.356.000	96,14%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	103.343.908	99.356.000	96,14%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	122.281.511	107.921.608	88,26%
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122.281.511	107.921.608	88,26%
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.875.000	7.875.000	100,00%
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.360.000	27.282.068	99,72%
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87.046.511	72.764.540	83,59%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	356.693.650	330.782.562	92,74%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	61.637.350	61.410.300	99,63%
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	33.982.750	33.755.700	99,33%
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	27.654.600	27.654.600	100,00%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	295.056.300	269.372.262	91,30%
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	186.775.000	170.024.250	91,03%
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	108.281.300	99.348.012	91,75%

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	344.213.950	309.259.341	89,85%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.250.000	59.150.000	99,83%
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.250.000	59.150.000	99,83%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	274.763.950	239.987.832	87,34%
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	107.607.950	106.346.441	98,83%
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	167.156.000	133.641.391	79,95%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.200.000	10.121.509	99,23%
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.200.000	10.121.509	99,23%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.965.000	2.965.000	100,00%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.965.000	2.965.000	100,00%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.965.000	2.965.000	100,00%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	555.734.403	546.652.144	98,37%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	122.893.700	118.349.625	96,30%
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	78.260.000	78.090.000	99,78%

2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.633.700	40.259.625	90,20%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	432.840.703	428.302.519	98,95%
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.711.375	24.484.410	99,08%
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.532.500	345.134.167	99,02%
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.596.828	58.683.942	98,47%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	269.084.000	251.121.971	93,32%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.750.000	70.665.521	99,88%
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	70.750.000	70.665.521	99,88%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.134.000	104.066.450	86,63%
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus)	120.134.000	104.066.450	86,63%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.200.000	76.390.000	97,69%
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	78.200.000	76.390.000	97,69%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.102.370.944	1.035.816.553	93,96%

2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.633.700	40.259.625	90,20%
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	578.325.000	531.906.667	91,97%
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33.390.000	31.472.800	94,26%
.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	472.954.914	461.083.186	97,49%

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025 , Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. TAUFIK KURNIAWAN
Jabatan : Pj. Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



M. TAUFIK KURNIAWAN

Probolinggo, Januari 2025
Pihak Pertama,



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	90%
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Sesuai Dengan Ketentuan. - Peringkat Kategori Kota Layak Anak	100% Utama
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A

- Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7.108.620.077,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial.	60.708.800,-	DAU
- Program Rehabilitasi Sosial.	1.140.781.000,-	DAU
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	7.447.874.400,-	DAU/DBHCHT
- Program Penanganan Bencana.	309.062.000,-	DAU
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .	128.657.000,-	DAU

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan.	293.090.000,-	DAU
- Program Perlindungan Perempuan.	352.849.200,-	DAU/DAK NF
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.	5.500.000,-	DAU
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).	550.400.000,	DAU
- Program Perlindungan Khusus Anak.	269.084.000,-	DAU/DAK NF
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	1.282.814.000,-	DAU
Jumlah Rp. 18.949.440.477,-		

Pihak Kedua,



M. TAUFIK KURNIAWAN

Probolinggo, Januari 2025
Pihak Pertama,



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

Tabel 2.4.
 Perjanjian Kinerja (Pergantian Walikota)
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 Kota Probolinggo Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.**
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMINUDDIN**
 Jabatan : Wali Kota Probolinggo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WALI KOTA PROBOLINGGO

AMINUDDIN

Probolinggo, Maret 2025
 Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PROBOLINGGO**

Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670711 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	90%
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Sesuai Dengan Ketentuan.	100%
		- Peringkat Kategori Kota Layak Anak	Utama
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.108.620.077,00	DAU
2	Pemberdayaan Sosial	60.708.800,00	DAU
3	Rehabilitasi Sosial	1.140.781.000,00	DAU
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.447.874.400,00	DAU/DBHCHT
5	Program Penanganan Bencana	309.062.000,00	DAU
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	128.657.000,00	DAU

7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	293.090.000,00	DAU
8	Perlindungan Perempuan	352.849.200,00	DAU/DAK NF
9	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	5.500.000,00	DAU
10	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	550.400.000,00	DAU
11	Perlindungan Khusus Anak		DAU/DAK NF
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.282.814.000	DAU
	JUMLAH	18.949.440.477	

Probolinggo, Maret 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**



Dr. REY-SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja P-APBD
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MADIHAH, S.K.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMINUDDIN**
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMINUDDIN

Probolinggo, Oktober 2025

Pihak Pertama,

MADIHAH, S.K.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19750312 199703 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	90%
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Sesuai Dengan Ketentuan.	100%
		Peringkat Kategori Kota Layak Anak	Utama
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	6.928.378.333,-	DAU
2	Program Pemberdayaan Sosial.	41.122.920,-	DAU
3	Program Rehabilitasi Sosial.	1.277.045.897,-	DAU
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	7.916.910.987,-	DAU/DBHCHT
5	Program Penanganan Bencana.	263.640.788,-	DAU
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.	122.281.511,-	DAU

7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan.	356.693.650,-	DAU
8	Program Perlindungan Perempuan.	344.213.950,-	DAU/DAK NF
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.	2.965.000,-	DAU
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).	555.734.403,-	DAU
11	Program Perlindungan Khusus Anak.	269.084.000,-	DAU/DAK NF
12	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	1.102.370.944,-	DAU
Jumlah		19.180.442.383,-	

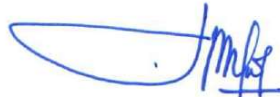
Pihak Kedua,



AMINUDDIN

Probolinggo, Oktober 2025

Pihak Pertama,



MADIHAH, S.K.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19750312 199703 2 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Lebih dari 89%	Sangat Baik
2.	60% hingga 80%	Baik
3.	40% hingga 60%	Cukup
4.	20% hingga 40%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2024, dan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, menganalisa efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

- a. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- b. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;
- c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- e. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- f. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- g. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- h. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- i. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2023, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2024 atau target akhir tahun Renstra 2019 - 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.1.A.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	2025	2025	2025
Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	98,75%	109,72%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2024

Tabel 3.1.1.B.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	89%	89%	90%	91,18%	97,64%	98,75%	102,45%	109,71%	109,72%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.1.C

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90,50%	98,75%	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.1.D.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Keterangan
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	98,75%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.1.E.

Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Persentase Anggaran Terhadap Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	9.621.002.103	50,16%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.1.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	98,75%	109,72%	9.621002.103	7.387.013.585	76,78%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	98,75%	76,78%	77,75%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan /
Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.1.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	98,75%	-

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.I.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025
Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	90%	98,75%	109,72%
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025
Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan Yang Aktif

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%	98%	98%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Tabel 3.1.2.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%	N/A	N/A	98%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.2.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%	98%	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.2.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	98%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.2.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	1.102.370.944	5,75%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.2.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%	98%	98%	1.102.370.944	1.035.816.553	93,96%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel 3.1.2.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	98%	93,96%	95,87%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan /
Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.2.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%	98%	Karena ada 1 satu Lembaga Kemasyarakatan, yaitu POSYANDU berada di bawah Dinas Kesehatan

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.2.I.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
			2025	2025
2	3	4	7	10
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,00%

3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan

Dalam Pembangunan

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.3.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama	N/A	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Tabel 3.1.3.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama	Madya	-	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode

Renstra

Tabel 3.1.3.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Mentor	-	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.3.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	-	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.3.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	359.658.650	1,88%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama	-	-	359.658.650	333.747.562	92,80%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel 3.1.3.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	N/A	92,80%	-

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.3.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama	-	Belum Ada Penilaian dari Kementerian PPPA

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.3.I.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			2025	2025	2025
Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Utama	N/A	N/A
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

3.14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang Anak

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.4.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	100%
Kategori Kota Layak	Utama	-	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2024

Tabel 3.1.4.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		Tahun 2025
		Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	100,0%	100%
Kategori Kota Layak	Utama	Utama	-	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.4.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0%	100%
Kategori Kota Layak Anak	Utama	-	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.4.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100,0%	-	-
Kategori Kota Layak	Utama	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.4.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	555.734.403	2,85%
Kategori Kota Layak	613.297.950	2,92%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.4.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0%	100%	555.734.403	546.652.144	98,37%
Kategori Kota Layak	Utama	-	-	613.297.950	560.381.312	91,37%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.4.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	98,37%	98,37
Kategori Kota Layak	-	91,37%	-

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan /
Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.4.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0%	-
Kategori Kota Layak	Utama	0	Belum ada penilaian dari Kementerian PPPA

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.4.I.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Sesuai Dengan Ketentuan.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Sesuai Dengan Ketentuan.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Peringkat Kategori Kota Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Utama	N/A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		

3.15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.4.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A	A	100%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2024

Tabel 3.1.4.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		Tahun 2025
		Tahun 2023	Tahun 2024	
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A	-	-	A

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.4.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A	A	100%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.4.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.4.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	6.928.378.333	36,12

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.4.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A	A	100%	6.928.378.333	6.231.171.716	89,94%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.4.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	100%	89,94%	89,94%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan /
Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.4.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	A	A	-

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.4.I.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025
2	3	4	7	10
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	A	A
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp 19.180.442.383,- yang dilaksanakan melalui 12 (Dua Belas) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 85 (Delapan Puluh Lima) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2024 adalah Rp 16.094.782.872,- dengan rata-rata prosentase capaian

anggaran program sebesar 83,91 %. Secara rinci, realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.928.378.333	6.231.171.716	89,94%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.790.000	113.268.435	97,82%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.910.000	7.289.000	81,81%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.880.000	105.979.435	99,16%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.138.034.318	4.599.150.064	89,51%
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.994.000.591	4.461.213.786	89,33%
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.928.000	110.178.000	99,32%
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.105.727	27.758.278	83,85%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.215.000	1.215.000	100,00%
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.215.000	1.215.000	100,00%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.905.317	268.153.555	99,72%
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.200.000	16.183.800	99,90%
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	252.705.317	251.969.755	99,71%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.056.295	314.425.378	94,98%
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.648.890	36.259.001	91,45%
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.661.200	16.204.431	97,26%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.189.062	10.962.876	97,98%
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	1.430.000	91,67%
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.934.272	99,56%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.767.143	180.379.774	98,16%
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	63.230.000	54.255.024	85,81%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.650.000	374.121.865	81,22%
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	55.000.000	55.000.000	100,00%
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	405.650.000	319.121.865	78,67%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.675.000	147.985.830	84,72%
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.972.500	99,08%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.690.000	103.160.870	79,54%
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.185.000	19.152.460	99,83%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.800.000	22.700.000	99,56%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.052.403	412.851.589	94,25%
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.484.193	21.152.588	90,07%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.926.470	71.055.228	93,58%
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	7.160.000	71,60%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.323.500	62.709.773	93,15%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.318.240	250.774.000	95,96%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	41.122.920	36.858.100	89,63%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	41.122.920	36.858.100	89,63%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.732.500	1.848.300	39,06%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.697.500	29.600.000	96,42%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.359.820	1.219.800	89,70%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.184.000	3.130.000	98,30%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.149.100	1.060.000	92,25%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.277.045.897	1.141.774.536	89,41%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.066.405.000	947.481.251	88,85%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	746.000.000	696.645.000	93,38%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	1.450.000	1.450.000	100,00%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	37.250.000	30.470.001	81,80%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.250.000	15.311.000	60,64%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.905.000	37.105.000	92,98%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	72.325.000	71.600.000	99,00%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	51.050.000	48.080.750	94,18%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	74.625.000	40.000.000	53,60%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.050.000	1.350.000	13,43%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.500.000	450.000	30,00%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.500.000	750.000	50,00%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	5.500.000	4.269.500	77,63%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	210.640.897	194.293.285	92,24%
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	51.750.000	48.549.000	93,81%
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	98.940.897	94.299.185	95,31%
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	38.000.000	30.849.000	81,18%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.600.000	3.600.000	100,00%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.000.000	3.999.000	99,98%
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.600.000	3.600.000	100,00%
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.250.000	5.102.400	97,19%
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	1.655.700	66,23%
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	3.000.000	2.639.000	87,97%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.916.910.987	5.884.274.916	74,33%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.916.910.987	5.884.274.916	74,33%
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	432.908.976	409.857.835	94,68%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.938.345.400	5.088.346.234	73,34%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	545.656.611	386.070.847	70,75%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	263.640.788	216.184.425	82,00%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	160.296.880	116.828.425	72,88%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	56.900.000	37.230.225	65,43%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	7.696.880	1.148.200	14,92%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8.200.000	-	0,00%
.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.400.000	700.000	29,17%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	85.100.000	77.750.000	91,36%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	103.343.908	99.356.000	96,14%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	103.343.908	99.356.000	96,14%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	122.281.511	107.921.608	88,26%
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122.281.511	107.921.608	88,26%
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.875.000	7.875.000	100,00%
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.360.000	27.282.068	99,72%
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87.046.511	72.764.540	83,59%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	356.693.650	330.782.562	92,74%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	61.637.350	61.410.300	99,63%
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	33.982.750	33.755.700	99,33%
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	27.654.600	27.654.600	100,00%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	295.056.300	269.372.262	91,30%
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	186.775.000	170.024.250	91,03%
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	108.281.300	99.348.012	91,75%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	344.213.950	309.259.341	89,85%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.250.000	59.150.000	99,83%
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.250.000	59.150.000	99,83%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	274.763.950	239.987.832	87,34%
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	107.607.950	106.346.441	98,83%
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	167.156.000	133.641.391	79,95%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.200.000	10.121.509	99,23%
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.200.000	10.121.509	99,23%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.965.000	2.965.000	100,00%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.965.000	2.965.000	100,00%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.965.000	2.965.000	100,00%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	555.734.403	546.652.144	98,37%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	122.893.700	118.349.625	96,30%
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	78.260.000	78.090.000	99,78%
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.633.700	40.259.625	90,20%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	432.840.703	428.302.519	98,95%
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.711.375	24.484.410	99,08%
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.532.500	345.134.167	99,02%
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.596.828	58.683.942	98,47%

KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERGESERAN 3 P-APBD	REALISASI	%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	269.084.000	251.121.971	93,32%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.750.000	70.665.521	99,88%
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	70.750.000	70.665.521	99,88%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.134.000	104.066.450	86,63%
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus)	120.134.000	104.066.450	86,63%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.200.000	76.390.000	97,69%
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	78.200.000	76.390.000	97,69%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.102.370.944	1.035.816.553	93,96%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.102.370.944	1.035.816.553	93,96%
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17.701.030	11.353.900	64,14%
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	578.325.000	531.906.667	91,97%
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33.390.000	31.472.800	94,26%
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	472.954.914	461.083.186	97,49%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan tolok ukur perencanaan strategi tahun 2025-2029.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 100 % dimana masing-masing indikator sasaran sudah ada yang memenuhi target capaian indikator Tahun 2025. Namun terdapat satu indikator yang tidak ada realisasi yaitu:

1. Indikator “Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya”, . Hal tersebut disebabkan belum adanya pelaksanaan Penilaian Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya pada tingkat Kementerian PPPA dikarenakan ada perubahan indikator. Dengan realisasi anggaran 2025 sebesar 92,80%, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.
2. Indikator “Peringkat Kategori Kota Layak Anak”, . Hal tersebut disebabkan belum adanya pelaksanaan Penilaian Peringkat Kategori Kota Layak Anak pada tingkat Kementerian PPPA dikarenakan ada perubahan indikator. Dengan realisasi anggaran 2025 sebesar 98,37%, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.
3. Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi”, . Hal ini disebabkan Karena ada 1 satu Lembaga Kemasyarakatan, yaitu POSYANDU berada di bawah Dinas Kesehatan.

4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program dan anggaran yang lebih baik. Selain itu pentingnya mencermati aturan-aturan penganggaran yang ada sebab kebijakan pada tahun 2025 merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 harus menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Nomenklatur yang berbeda dari tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan indikator kinerja pada setiap sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat